



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI RIAU
UNIT KERJA : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **452235**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.389.000.000

1. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/56 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MERANTI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/80 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah Seluas 448 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 19.500 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, WARISAN Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1.354 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
10. Tanah Seluas 5.980 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
11. Tanah Seluas 4.485 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	512.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	91.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.013.700.000
III. HUTANG	Rp.	95.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.918.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.